



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 65 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 beberapa Perangkat Daerah harus disesuaikan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kota Blitar Tahun 2023, Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 Perangkat Daerah harus mengintegrasikan pohon kinerja dalam Dokumen Perencanaan, sehingga Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
11. Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 48) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 – 2026.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 48) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 32) diubah, sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 12 Desember 2023
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

8. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL KOTA BLITAR TAHUN 2021-2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang strategis yaitu sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Renstra menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

Dinas Sosial Kota Blitar merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Dinas Sosial Kota Blitar mengemban amanah menyelenggarakan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang sosial yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.

Secara teknis, proses penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Blitar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Dinas Sosial Kota Blitar tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar dengan memperhatikan Renstra Kementerian Sosial maupun Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Blitar ini telah disusun melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Persiapan, meliputi:
 - 1) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
 - 2) Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
 - 3) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
 - 4) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
- 2) Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD dan mencakup:
 - 1) Analisis gambaran pelayanan;
 - 2) Analisis permasalahan;
 - 3) Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;

- 4) Analisis isu strategis;
 - 5) Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
 - 6) Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.
- 3) Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah, telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dan disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD.
 - 4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
Forum Perangkat Daerah merupakan forum para pemangku kepentingan Perangkat Daerah untuk membahas rancangan Resntra untuk mendapatkan masukan bagi penajaman dan penyempurnaan substansi rancangan Renstra Perangkat Daerah.
 - 5) Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah
Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan.
 - 6) Penetapan Renstra Perangkat Daerah
Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.
Dalam pelaksanaannya Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2021-2026, perlu dilakukan beberapa penyesuaian. Perubahan Renstra Dinas Sosial Kota Blitar ini dilakukan karena beberapa hal :
 1. Terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang berdampak pada pemutakhiran seluruh kode sub kegiatan.
 2. Terbitnya Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.14.3/1483/SJ tentang Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBHCHT TA 2023, DBHDR TA 2023 dan DAK TA 2023.
 3. Tindak lanjut evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kota Blitar Tahun 2023 terkait integrasi pohon kinerja ke dokumen perencanaan. Penyesuaian dilakukan pada level tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sesuai hasil pemetaan Pohon Kinerja Perangkat Daerah.
 4. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang berdampak pada penyesuaian kegiatan dan sub kegiatan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2021 - 2026 adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 868) ;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur erencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.14.3/1483/SJ tentang Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBHCHT TA 2023, DBHDR TA 2023 dan DAK TA 2023;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
34. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025;
35. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2012 Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
37. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
38. Peraturan Walikota Blitar Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 49).

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2021 - 2026 disusun dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan guna peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan sosial untuk mewujudkan visi dan misi daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2021-2026 adalah :

- a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Blitar untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di bidang sosial.
- b. Menjadi acuan kerja resmi bagi dinas serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang sosial.
- c. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Sosial Kota Blitar.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 :

BAB I.	PENDAHULUAN
1.1.	Latar Belakang
1.2.	Landasan Hukum
1.3.	Maksud Tujuan
1.4.	Sistematika Penulisan
BAB II.	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1.	Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2.	Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3.	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III.	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
3.2.	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3.	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
3.4.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5.	Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV.	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V.	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI.	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII.	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII.	PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Perubahan Renstra 2021-2026 ini juga mengakomodir Peraturan Walikota Blitar Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial. Dinas Sosial Kota Blitar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Dinas Sosial Kota Blitar melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- 2) Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang sosial;
- 3) Pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang sosial;
- 4) Penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan bidang sosial serta pelayanan umum di bidang sosial;
- 5) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan dan jaminan sosial;
- 6) Penyusunan dan pelaksanaan pemberdayaan sosial;
- 7) Perumusan, pelaksanaan, monitoring serta evaluasi kebijakan rehabilitasi sosial;
- 8) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan sosial;
- 9) Penyusunan kebijakan dan pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
- 10) Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
- 11) Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- 12) Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial sesuai dengan kewenangan Daerah;
- 13) Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- 14) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 15) Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- 16) Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang sosial;
- 17) Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang sosial secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
- 18) Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang sosial; dan
- 19) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan organisasi Dinas Sosial terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin Sekretaris yang membawahi Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial,

Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial serta kelompok jabatan fungsional. Adapun penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas : menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam tugas dan fungsi Dinas Sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Walikota Blitar.
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi perencanaan, pengkoordinasian program kerja unit kerja, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan dilingkungan dinas;

Untuk menjalankan tugasnya Sekretariat Dinas Sosial Kota Blitar menjalankan fungsi :

- 1) Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah ;
- 2) Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja unit kerja secara terpadu;
- 3) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program/kegiatan Sekretariat;
- 4) Fasilitasi dan pengkoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing bidang dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- 5) Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- 6) Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- 7) Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- 8) Pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang dilingkungan dinas;
- 9) Pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, pelaksanaan tata laksana serta mekanisme kerja perangkat daerah dan fasilitasi pengusulan produk hukum lainnya;
- 10) Penyelenggaraan, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan, barang milik daerah dan penatausahaan keuangan;
- 11) Pengkoordinasian dan fasilitasi tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;
- 12) Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
- 13) Fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Perubahan Penetapan Kinerja;
- 14) Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat Dinas;
- 15) Pengkoordinasian dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- 16) Fasilitasi pelaksanaan perbendaharaan belanja;
- 17) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- 18) Fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

- 19) Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - 20) Pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan laporan dan kinerja pelaksanaan urusan pemerintah;
 - 21) Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di urusan sosial;
 - 22) Fasilitasi pelaksanaan pengukuran pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
 - 23) Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - 24) Fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian intern Pemerintah (SPIP);
 - 25) Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Sosial secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah; dan
 - 26) Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
- Untuk menjalankan tugasnya, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial menjalankan fungsi :
- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Penyusunan program/kegiatan di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
 - 3) Penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidangrehabilitasi sosial;
 - 4) Pelaksanaan rehabilitasi dan pelayanan sosial serta pembinaan lanjutan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ;
 - 5) Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan pengelolaan di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
 - 6) Pelaksanaan penyuluhan, bimbingan dan pengelolaan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
 - 7) Pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
 - 8) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
 - 9) Pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial; dan
 - 10) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.
4. Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Pemberdayaan Sosial.
- Untuk menjalankan tugasnya, Bidang Pemberdayaan Sosial menjalankan fungsi :
- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Menyusun program/kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial;

- 3) Penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial;
 - 4) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
 - 5) Pelaksanaan dan koordinasi pembinaan dan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial;
 - 6) Pelaksanaan penyuluhan serta bimbingan sosial dalam rangka menumbuhkan kesadaran sosial dan partisipasi sosial masyarakat;
 - 7) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
 - 8) Pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial dalam rangka pelestarian nilai-nilai kejuangan, keperintisan dan kepahlawanan;
 - 9) Pencatatan/pendataan, pengaturan dan registrasi tanah makam pada Taman Makam Pahlawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - 10) Fasilitasi dan pelaksanaan pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
 - 11) Pelayanan pengangkutan serta pemakaman jenazah dan rangka jenazah (jenazah pahlawan, Veteran dan masyarakat lainnya) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 12) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
 - 13) Melaksanakan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial;
 - 14) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rekomendasi perijinan dan pengelolaan sumber dana sosial oleh masyarakat; dan
 - 15) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
5. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- Untuk menjalankan tugasnya, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :
- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Penyusunan program/kegiatan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - 3) Penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan fakir miskin;
 - 4) Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan bantuan, dan perlindungan kesejahteraan sosial bagi korban bencana, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), keluarga dan pekerja migran terlantar bermasalah sosial, orang telantar, serta jaminan sosial;
 - 5) Penyusunan pedoman penyelenggaraan bantuan dan perlindungan kesejahteraan sosial bagi korban bencana,

- Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), keluarga dan pekerja migran terlantar bermasalah sosial, serta jaminan sosial;
- 6) Pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan bantuan dan perlindungan kesejahteraan sosial bagi korban bencana, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), keluarga dan pekerja migran terlantar bermasalah sosial, serta jaminan sosial;
 - 7) Pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan bantuan dan perlindungan kesejahteraan sosial bagi korban bencana, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), keluarga dan pekerja migran terlantar bermasalah sosial, serta jaminan sosial;
 - 8) Pelaksanaan pengelolaan data fakir miskin cakupan kota;
 - 9) Pemberdayaan fakir miskin dan penanggulangan kemiskinan;
 - 10) Pelaksanaan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan pengembangan ekonomi masyarakat;
 - 11) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
 - 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
6. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 2.1

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Keberadaan Sumber daya yang meliputi Sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas – tugas dan peran Dinas Sosial Kota Blitar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Jumlah Sumber daya manusia Dinas Sosial sebanyak 26 orang terdiri dari 25 orang PNS dan 1 orang PTT.

Komposisi pegawai Dinas Sosial Kota Blitar berdasarkan golongan/kebangkutan dan pendidikan formal dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.1
KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN
GOLONGAN RUANG

No.	Pangkat/Golongan Ruang	L	P	Jumlah
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-	-
2	Pembina Tk. I (IV/b)	-	2	2
3	Pembina (IV/a)	1	1	2
4	Penata Tk. I (III/d)	2	6	8
5	Penata (III/c)	-	-	-
6	Penata Muda Tk. I (III/b)	-	1	1
7	Penata Muda (III/a)	2	3	5
8	Pengatur Tk. I (II/d)	2	-	2
9	Pengatur (II/c)	4	-	4
10	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1	-	1
11	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-
12	PTT	1	-	1
Total		13	13	26

Sumber data : Dinas Sosial 2023

Tabel 2.2.2
KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN
PENDIDIKAN FORMAL

No.	Tingkat Pendidikan	L	P	Jumlah
1.	S2 (Pasca Sarjana)	-	2	2
2.	S1 (Sarjana)	4	6	10
3	Diploma IV	-	2	2
4.	Diploma III	-	3	3
5.	Diploma II	-	-	-
6.	SLTA	9	-	9
7.	SLTP	-	-	-
	Jumlah	13	13	26

Sumber data : Dinas Sosial 2023

b. Sarana Dan Prasarana

Pendukung kelancaran kinerja lainnya yang tidak kalah pentingnya yaitu aspek sarana prasarana. Sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Sosial Kota Blitar, antara lain :

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung bangunan kantor	1 Unit	Baik/Terawat
2.	Shelter PMKS	1 Unit	Baik/Terawat
3.	Sekber perintis kemerdekaan/ yayasan lainnya	1 Unit	Baik/Terawat
4.	Kendaraan dinas/operasional	3 Unit	Baik/Terawat
5.	Sepeda Motor	13Unit	Baik/Terawat
6.	Komputer PC	28 Unit	Baik/Terawat

7.	Printer	30 Unit	Baik/Terawat
8	Laptop	20 Unit	Baik/Terawat
9.	TV	4 Unit	Baik/Terawat
10.	Kamera	3 Unit	Baik/Terawat
11.	AC	20 Unit	Baik/Terawat
12.	APAR	5 Unit	Baik/Terawat
13.	Brankas	1 Unit	Baik/Terawat
14.	Pesawat telpon	3 Unit	Baik/Terawat
15.	Mesin Fax	2 Unit	Baik/Terawat
16.	Meja Kursi tamu	7 Unit	Baik/Terawat
17.	Meja kursi rapat	1 set	Baik/Terawat
18.	Meja kursi Eselon 2	1 set	Baik/Terawat
19.	Meja kursi Esselon 3	4 Unit	Baik/Terawat
20.	Meja kursi Esselon 4	8 set	Baik/Terawat
21.	Meja kursi kerja Staf	15 set	Baik/Terawat
22.	Almari	7 unit	Baik/Terawat
23.	Filing kabinet	10 Unit	Baik/Terawat

Sumber data : Dinas Sosial 2023

Disamping sarana prasarana tersebut, Dinas Sosial mendapatkan pinjam pakai kendaraan operasional dari Kementerian Sosial berupa 1 Unit Modil Dapur Umum Lapangan dan 1 Unit sepeda motor. Sedangkan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur mendapatkan pinjam pakai sepeda motor operasional sebanyak 2 unit untuk koordinator TKSK dan koordinator Tagana.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja organisasi merupakan capaian sasaran strategis yang diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada indikator kinerja sasaran strategis tersebut. Kemudian atas hasil dari pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan capaian sasaran strategis serta alternatif solusi apa saja yang perlu dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Capaian Kinerja Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2017-2020 sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Blitar
Tahun 2016-2021

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Restra/ Lainnya PD Tahun ke					Realisasi Capaian tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke (%)				
						2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	Indikator Tujuan																			
1	Indeks Gini (IKU Kota)	Indeks			0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,39	0,35	0,33	NA		91,67	102,78	108,33	NA	
II	Indikator Sasaran																			
1	Persentase Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (IKU)	%			1	19,69	1	1	1	1	-1,29	5,89	3,25	-7,31		-6,55	589,00	325,00	-731,00	
2	Persentase (%) PMKS (Lansia, Fakir Miskin, Anak Bermasalah Sosial, Orang Terlantar) yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial (IKU)	%			90	82	82	85	90	90	91,35	90,03	90,23	92,3		111,40	109,79	106,15	102,56	
3	Persentase PSKS yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (IKU)	%			100	98	98	99	100	100	100	100	100	100		102,04	102,04	101,01	100,00	
4	Persentase Fakir Miskin yang mandiri (IKU)	%			10	-	-	10	10	10	-	-	18,07	18,18		-	-	180,7	181,8	
III	Indikator SPM																			
1	Presentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	80			80	80	80	80	80	100	100				125,00	125,00			
2	Presentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	80			80	80	80	80	80	17,67	12,22				22,09	15,28			
3	Presentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana	%	80			80	80	80	80	80	100	100				125,00	125,00			

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Restra/ Lainnya PD Tahun ke					Realisasi Capaian tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke (%)				
						2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.																			
4	Presentase (%) wahana kesejahteraan social berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	60			60	60	60	60	60	100	100				166,67	166,67			
5	Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama tanggal darurat	%	80			80	80	80	80	80	100	0				125,00	0,00			
6	Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	80			80	80	80	80	80	0	0				0,00	0,00			
7	Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental,serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	40			40	40	40	40	40	42,35	60,78				105,88	151,95			
8	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100					100	100	100	100	100	100	100				100,00	100,00	
9	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100					100	100	100	100	100	100	100				100,00	100,00	
10	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100					100	100	100	100	100	100	100				100,00	100,00	
11	Persentase (%) gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100					100	100	100	100	100	100	100				100,00	100,00	

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Restra/ Lainnya PD Tahun ke					Realisasi Capaian tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke (%)				
						2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota	%	100					100	100	100	100	100	100	100				100,00	100,00	
IV	Indikator Kinerja Kunci (IKK)																			
1	Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	unit		-		9	11	11	11	11	9	11				100,00	100,00			
2	Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%		40		40	40	40	40	40	42,35	60,78				105,88	151,95			
3	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	%		80		80	80	80	80	80	100	100				125,00	125,00			
4	Rasio rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar dengan jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng	%											2,08	2,97						
5	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	%											66,67	100						
6	Rasio pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	%											48,96	47,52						
V.	Indikator Program																			
1	Persentase warga miskin yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Restra/ Lainnya PD Tahun ke					Realisasi Capaian tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke (%)				
						2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan dan pembinaan Kesejahteraan sosial	%				78	80	82	85	100	100	100	100	100		128,21	125	121,95	117,65	
3	Persentase PSKS yang terampil dalam pelayanan kesejahteraan sosial	%				68	72	75	77	80	100	100	100	100		147,06	138,89	133,33	129,87	
4	Persentase PMKS terlatih	%				20	25	30	35	35	16,24	17,58	19,70	20,32		81,20	70,32	65,67	58,06	

Sumber data : Dinas Sosial Kota Blitar

Dari tabel di atas dapat diketahui realisasi capaian IKU pertama yaitu persentase penurunan PMKS tertinggi pada tahun 2018 sebesar 5,89%. Beberapa hal yang mempengaruhi penurunan angka PMKS diantaranya komitmen para pemangku kebijakan dalam melaksanakan program penanganan PMKS yang meliputi perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial yang disinergikan dengan program-program pemerintah pusat antara lain program penanganan fakir miskin. Upaya memerangi kemiskinan merupakan salah satu program prioritas karena berdasarkan data yang diperoleh, populasi fakir miskin memberikan kontribusi tertinggi pada angka PMKS dimana pada tahun 2017-2020 persentase fakir miskin terhadap PMKS berada pada angka 88%-90%. Realisasi terendah IKU ini terjadi pada tahun 2020 sebesar (-7,31%) sehingga dikategorikan tidak berhasil karena jumlah PMKS tidak menurun tetapi justru mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan sejak awal tahun 2020 terjadi pandemi covid 19 yang sangat berdampak terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat sehingga terjadi peningkatan jumlah PMKS utamanya dari golongan fakir miskin.

Capaian IKU kedua (Persentase PMKS yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial) tertinggi pada tahun 2020 dengan realisasi sebesar 92,30% dan terendah tahun 2018 sebesar 90,03%. Keterbatasan sarana prasarana rehabilitasi sosial lanjutan utamanya panti sosial adalah kendala yang sering dialami dalam upaya pelayanan rehabilitasi sosial karena merupakan kewenangan provinsi dengan kapasitas terbatas, sehingga pemberian layanan rujukan bagi PMKS tidak serta merta bisa dilakukan. Namun penguatan jejaring kesejahteraan sosial yang dengan balai/panti/lembaga/yayasan sosial baik milik pemerintah maupun swasta antar kabupaten/kota adalah alternatif yang tepat dalam memberikan layanan rehabilitasi sosial PMKS. Keberadaan shelter/rumah singgah sangat bermanfaat sebagai upaya penanganan dini sebelum PMKS dirujuk ke daerah lain. Namun sampai saat ini pengelolaan shelter belum maksimal karena belum tersedia SDM pengelolanya.

Realisasi IKU ketiga (Persentase PSKS yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial) tercapai 100% sejak tahun 2017 sampai dengan 2020. Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Sosial terus berupaya memotivasi dan meningkatkan kapasitas PSKS dalam upaya penanganan masalah sosial baik melalui pembinaan, Bimtek, penguatan jejaring sosial juga pemberian apresiasi terhadap PSKS berupa insentif bulanan. Akan tetapi jika dilihat jumlahnya dari tahun ke tahun relatif kurang ada peningkatan mengingat PSKS adalah profesi yang bersifat sosial yang kurang diminati oleh masyarakat.

IKU keempat (Persentase fakir miskin yang mandiri) merupakan IKU baru di tahun 2019 dengan realisasi 18,07% dan tahun 2020 terealisasi sebanyak 18,18%, lebih tinggi dari target per tahun 10%. IKU ini dicapai dengan program pelatihan keterampilan PMKS (fakir miskin) dan setelah pelatihan diberikan bantuan sosial peralatan usaha dengan harapan mereka bisa segera memrintis usaha mandiri sektor informal agar terentaskan dari kemiskinan. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, belum semua alumni pelatihan merintis usaha karena kendala permodalan dan akses pemasaran hasil usaha serta kurangnya pendampingan wirausaha.

Capaian kinerja berdasarkan SPM/IKK rata-rata tercapai sesuai target. Komitmen pemangku kebijakan terutama dalam hal penganggaran dan sinergitas dan jejaring yang kuat antar OPD, PSKS dan Lembaga-lembaga sosial sangat mendukung pencapaian target SPM. Lemahnya assessment terhadap pemerlu layanan perlu terus dikuatkan sehingga pemberian layanan SPM akan optimal.

Dari empat indikator kinerja program, dua indikator kinerja tercapai melebihi target yaitu Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan dan pembinaan Kesejahteraan sosial dan Persentase PSKS yang terampil dalam pelayanan kesejahteraan sosial. Indikator kinerja program Persentase warga miskin yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar tercapai sesuai target. Sinergi program dan kegiatan dengan pemerintah pusat, provinsi dan daerah serta koordinasi yang baik dengan seluruh stake holder sangat mendukung tercapainya target kinerja program. Sedangkan indikator kinerja persentase PMKS terlatih belum tercapai maksimal karena tingginya angka PMKS usia produktif sehingga belum didukung oleh pendanaan dan SDM yang memadai. Secara detail data capaian kinerja program sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.3.2
Capaian Kinerja Program Tahun 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase warga miskin yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100	100	100	100
1.1	Jumlah warga miskin yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	11.653	11.624	11.434	11.165
1.2	Jumlah Warga Miskin	11.653	11.624	11.434	11.165
2.	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan dan pembinaan kesejahteraan sosial	100	100	100	100
2.1	Jumlah PMKS yang mendapatkan Pelayanan dan pembinaan Kesejahteraansosial	125	250	471	535
2.2	Jumlah PMKS yang mengajukan bantuan pelayanan Kesejahteraan Sosial	125	250	471	535
3.	Persentase PSKS yang terampil dalam pelayanan kesejahteraan sosial	100	100	100	100
3.1	Jumlah PSKS yang terampil dalam pelayanan kesejahteraan sosial	125	132	132	133
3.2	Jumlah PSKS	125	132	132	133
4.	Persentase PMKS terlatih	16,24	17,58	19,70	20,32
4.1	Jumlah PMKS yang mendapatkan pelatihan keterampilan	1.009	1.092	1.224	1.262
4.2	Jumlah PMKS usia Produktif	6.212	6.212	6.212	6.212

Sumber: Dinas Sosial, 2020

Sedangkan realisasi anggaran belanja dalam rangka pencapaian kinerja Dinas Sosial Kota Blitar tahun 2017-2021 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Pada Dinas Sosial Tahun 2017-2021

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Capaian Pada Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke					Rata - rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA DAERAH																	
Belanja Tidak Langsung	2.161.905.000	2.233.885.914	3.238.828.778	3.000.088.398	3.163.628.100	1.806.323.490	2.076.600.633	2.712.279.815	2.635.115.898	3.163.628.100	83,55	92,96	93,74	87,84	100	11.60	15.70
Belanja Langsung	20.800.284.676	24.569.668.400	23.452.719.500	21.434.854.461	23.309.298.114	20.555.043.609	23.276.063.763	23.121.181.926	21.014.747.235	23.309.289.114	98,82	94,73	98,59	90,16	100	13,72	3,60
Belanja Pegawai	134.064.200	32.492.000	57.511.000	38.651.000	0	109.548.200	17.937.000	46.200.000	37.250.000	0	81,71	55,20	80,33	96,38	100	-32,89	-11,36
Belanja Barang dan Jasa	20.598.505.476	23.798.270.150	22.198.053.960	21.110.404.261	23.288.528.814	20.356.995.409	22.526.427.999	21.943.731.282	20.703.577.235	23.288.528.814	98,83	94,66	98,86	98,07	100	3,56	3,73
Belanja Modal	89.715.000	738.906.250	1.199.154.540	285.819.200	20.750.300	88.500.000	732.698.764	1.131.250.644	273.920.000	20.750.300	98,65	99,16	94,34	95,84	100	154,25	153,52
TOTAL	22.984.189.676	26.803.554.314	26.691.548.278	24.434.942.859	26.472.917.214	22.361.367.099	25.352.664.396	25.833.461.741	23.649.863.133	26.472.917.214	97,29	94,59	96,79	96,79	100	4,02	4,69

Sumber data : Dinas Sosial Kota Blitar

Dari tabel 2.3.2 dapat dibaca capaian serapan anggaran tertinggi selama kurun waktu 2017-2021 yaitu pada tahun 2017 sebesar 97,29% sedangkan terendah pada tahun 2018 sebesar 94,59%. Sisa anggaran merupakan sisa kontrak pekerjaan, artinya meskipun capaian dibawah 100% namun target kinerja tetap terpenuhi. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program/kegiatan, integritas dan kualitas SDM yang tersedia sangat pendukung kinerja pengelolaan pendanaan. Pemanfaatan kemajuan teknologi akan mempermudah pencapaian kinerja namun juga perlu diselaraskan dengan kapasitas dan kualitas SDM pengelolanya.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan kewajiban dari setiap pemerintah kepada warga masyarakatnya, namun demikian penyelenggaraan kesejahteraan sosial bukanlah suatu hal yang mudah karena permasalahan sosial terus berkembang dan semakin kompleks seiring dengan perkembangan jaman. Sebagaimana kita ketahui bahwa sasaran garapan dari Dinas Sosial Kota Blitar ialah para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang sebagian besar diantara mereka adalah penduduk miskin yang tidak mampu menjalankan peran dan fungsi sosialnya di masyarakat secara wajar.

Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah terkait pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial ini sangat tinggi karena selain dirasakan langsung oleh masyarakat juga berhasil atau tidaknya suatu proses pembangunan yang dilakukan oleh suatu pemerintahan ialah semakin berkurangnya jumlah penduduk miskin pada daerah tersebut atau dengan kata lain warga masyarakatnya sejahtera. Tuntutan terhadap kinerja Dinas Sosial Kota Blitar tidak hanya muncul dari masyarakat akan tetapi juga dari pihak pemerintah pusat maupun provinsi, hal tersebut tercermin dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dimana tujuan dari SPM tersebut ialah menselaraskan penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial sekaligus dalam rangka percepatan penuntasan permasalahan sosial di seluruh daerah di Indonesia sehingga menuntut pihak pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran serta sumber daya lainnya secara memadai guna mencapai target Standar Pelayanan Minimal.

Pandemi covid 19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 yang menyebar di seluruh pelosok Indonesia tak terkecuali Kota Blitar memaksa diterapkannya pola kehidupan baru yang membatasi aktivitas dan ruang gerak masyarakat yang berdampak pada kehidupan sosial ekonomi sehingga menyebabkan bertambahnya permasalahan sosial yang memerlukan penanganan serius dan menyeluruh dari seluruh stake holder.

Beberapa tantangan dalam pengembangan pelayanan pada Dinas Sosial antara lain :

- a. Kultur budaya masyarakat yang lebih mengandalkan bantuan langsung yang bersifat konsumsi daripada bantuan yang bersifat merangsang tumbuhnya usaha ekonomi produktif.
- b. Meningkatkan tuntutan hidup/roda perekonomian sehingga perlu akses yang lebih tepat untuk PPKS.
- c. Tuntutan kualitas pelayanan terhadap PPKS.

- d. Terbitnya Standar Pelayanan Minimal bidang sosial berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018.

Beberapa hal yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- b. Tingginya komitmen Kepala daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan terhadap PPKS.
- c. Adanya sinergitas program pemerintah pusat, provinsi dan Kab/Kota dalam penanganan masalah sosial secara komprehensif.
- d. Peran serta dunia usaha yang melembaga dalam penyelenggaraan upaya kesejahteraan sosial.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kota Blitar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 49 Tahun 2022, merupakan salah satu Perangkat Daerah yang bertugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Berbicara tentang masalah sosial tentu tidak bisa lepas dari problematika Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau istilah sekarang disebut Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih mewarnai Kota Blitar, antara lain masih tingginya jumlah PPKS yang mengalami gangguan fungsional dalam kehidupan sosial ekonomi yang memerlukan dukungan serius dari pemerintah, kurangnya tingkat kemandirian fakir miskin karena kurangnya motivasi dan rasa percaya diri untuk merintis usaha serta kendala permodalan dan akses pemasaran hasil usaha, rendahnya minat masyarakat terutama pemuda menjadi potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), terbatasnya tenaga fungsional pekerja sosial dan keterbatasan sarana prasarana pelayanan PMKS di Kota Blitar, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum dapat secara pasti mengukur tingkat kemiskinan di Kota Blitar. Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sampai saat ini membawa dampak memburuknya perekonomian dan meningkatnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran serta bertambahnya jumlah PPKS. Tahun 2020 data PPKS meningkat sebesar 7,31% dari tahun 2019. Hal ini tentunya memerlukan upaya ekstra keras dari pemerintah untuk menangani masalah PPKS yang sangat kompleks baik dari aspek perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial maupun pemberdayaan sosial.

Dari uraian tersebut diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Tabel 3.1.1 Perumusan Permasalahan Dinas Sosial

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih tingginya ketimpangan sosial masyarakat	Belum optimalnya upaya rehabilitasi dan pemberdayaan PPKS	Belum optimalnya rehabilitasi, pemberdayaan dan cakupan jaminan sosial bagi PPKS
		Validasi data PPKS masih belum optimal
		Belum memiliki SOP penanganan PPKS secara terintegrasi lintas OPD
		Belum adanya Rencana Aksi Penanggulangan PPKS (sesuai dengan kelompok PPKS)
		Belum adanya pilot project/duta berhasil PPKS sebagai pendorong motivasi PPKS
		Belum optimalnya pembinaan PPKS terkait pengelolaan ekonomi keluarga
	Belum optimalnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Kurangnya sinergitas antar PD dan terbatasnya jumlah relawan(PSKS) terkait program pendampingan wirausaha mandiri
	Manajemen pengelolaan TMP belum optimal	Sistem keamanan dan kebersihan TMP perlu ditingkatkan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Blitar merupakan implementasi yang harus dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026 dimana RPJMD tersebut merupakan perwujudan Visi dan Misi Walikota Blitar terpilih periode 2021-2026.

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan Visi Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi Pemerintah Kota Blitar yang ingin diwujudkan pada periode 2021-2026 adalah "KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat". Visi RPJMD tersebut berpijak pada Visi Jangka Panjang Kota Blitar sebagaimana

tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yaitu “Kota Blitar Sebagai Kota Pariwisata, Pusat Pelayanan Perdagangan Dan Jasa Yang Berwawasan Kebangsaan Dan Lingkungan Hidup”.

Selanjutnya, Visi Pembangunan Daerah Kota Blitar 2021-2026 tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, yang disebut dengan misi. Adapun misi Kota Blitar 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- Misi 1: Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan
- Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter
- Misi 3: Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital
- Misi 4: Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan
- Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

Di antara misi-misi utama yang difokuskan tersebut, Dinas Sosial Kota Blitar mengemban misi ketiga yaitu : “Mewujudkan berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital”.

Dari misi ketiga tersebut dijabarkan menjadi tujuan RPJMD sebagai berikut :

- Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat
- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

Sebagai OPD yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan sosial, Dinas Sosial secara langsung terkait pada tujuan “Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat”, dengan sasaran “Menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin” dan “Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat”.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Sosial

Dalam Menyusun Renstra Dinas Sosial Kota Blitar tidak bisa terlepas dari Renstra Kementerian Sosial karena tujuan nasional pembangunan bidang sosial dapat terwujud apabila didukung oleh tiap-tiap kabupaten/kota. Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024, secara umum diuraikan sebagai berikut :

- a. Potensi penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan
 - 1) Potensi sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan meliputi nilai kepahlawanan, kejuangan, keperintisan, kesetiakawanan sosial dan kearifan lokal, kelembagaan di bidang kesejahteraan sosial dan penaggulangan kemiskinan serta SDM di bidang kesejahteraan sosial .
 - 2) Pengembangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
 - 3) Terselenggaranya kebijakan perlindungan sosial komprehensif dan adaptif.

- 4) Penjangkauan layanan dasar sosial dan pengembangan kehidupan secara berkelanjutan.
 - 5) Kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah dan badan/dunia usaha.
 - 6) Sumber pembiayaan.
 - 7) Pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan, gender, modal sosial budaya dan transformasi digital.
- b. Permasalahan
- 1) Memastikan hidup yang berkualitas dan bermartabat bagi masyarakat.
 - 2) Memastikan kesempatan yang sama bagi penduduk miskin dan rentan dalam peningkatan sosial ekonomi.
 - 3) Memastikan ketahanan masyarakat melalui mitigasi risiko serta perlindungan social.
 - 4) Kerangka kelembagaan dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
 - 5) Penataan regulasi dalam rangka pembangunan kesejahteraan social dan penanggulangan kemiskinan.
 - 6) Pembiayaan dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- c. Tujuan:
- 1) Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan
 - 2) Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggaran kesejahteraan sosial yang profesional.
 - 3) Mewujudkan penguatan tata Kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik.
- d. Sasaran :
- 1) Sasaran pada tujuan 1 : Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan.
 - 2) Sasaran pada tujuan 2 :
 - Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial.
 - Meningkatnya kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
 - 3) Sasaran pada tujuan 3 : Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik.

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Pembangunan kesejahteraan sosial di Jawa Timur tertuang pada misi kedua provinsi Jawa Timur yaitu “Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan” yang dijabarkan pada tujuan “Menurunnya angka kemiskinan” yang memiliki

sasaran “Menurunnya penduduk miskin pedesaan” dan “Meningkatnya kemandirian PMKS”. Dalam upaya meningkatkan kemandirian PMKS strategi yang ditempuh:

1. Mendukung sistem perlindungan sosial melalui PKH plus dan jaminan sosial lainnya;
2. Pengembangan dan penguatan kapasitas PSKS dalam upaya penanganan PPKS.

Adapun permasalahan urusan sosial yang dihadapi adalah :

1. Belum optimalnya penanganan pengentasan penduduk miskin, 26 PPKS lainnya baik di panti maupun non panti;
2. Tingginya angka peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kalangan anak, remaja dan orang tua, bahkan di semua tingkatan dan kalangan masyarakat;
3. Belum semua pemerintah kabupaten/kota menyediakan shelter atau tempat penampungan sementara bagi PMKS terlantar khususnya ODGJ dan gelandangan psikotik;
4. Belum optimalnya pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT) untuk penanganan keluarga fakir miskin;
5. Belum terintegrasi pola pendampingan keluarga miskin yang dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota;
6. Masih tingginya stigma masyarakat terhadap eks ODGJ; dan
7. Menurunnya nilai-nilai kesetiakawanan, kepedulian dan kegotongroyongan di masyarakat.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Tujuan dari Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2011-2030, adalah “Mewujudkan Kota Blitar sebagai kota wisata kebangsaan yang didukung oleh sektor pertanian, perdagangan dan jasa yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan”.

Tujuan tersebut didasarkan pada potensi dan karakteristik yang ada di wilayah Kota Blitar, diantaranya yaitu Kota Blitar memiliki banyak lokasi pariwisata yang bersifat kebangsaan/ kepahlawanan, salah satunya yaitu adanya makam Sang Proklamator RI Presiden Soekarno serta berkembangnya sektor perdagangan dan jasa terutama di pusat kota. Oleh karena itu, Kota Blitar harus berusaha mempertahankan dan mengoptimalkan potensi-potensi tersebut agar dapat sustain/ berkelanjutan.

Memperhatikan tujuan penataan ruang Kota Blitar dan penjelasannya diatas, maka sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait kesejahteraan sosial maka akan berusaha meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan para PMKS/PPKS dan Korban Bencana. Peningkatan PMKS/PPKS dan korban bencana dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan berinteraksi sosial dan keberfungsian sosial secara lebih optimal sehingga mereka mampu mengatasi berbagai persoalan sosial dan mewujudkan lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi

yang bergerak di Bidang Sosial secara professional dan humanis.

Selanjutnya tentang Rencana Kawasan Peruntukan lainnya dalam Perda No. 12 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Blitar tahun 2011-2030, pasal 64 dan 65 disebutkan bahwa: Kawasan peruntukan lainnya meliputi :

- a. kawasan ruang evakuasi bencana alam;
- b. kawasan peruntukan kegiatan sektor informal;
- c. kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- d. kawasan peruntukan pelayanan umum.

Ruang yang ditetapkan sebagai ruang evakuasi bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a meliputi :

- a. Sekolah;
- b. Balai pertemuan;
- c. Kantor Kelurahan;
- d. Kantor Kecamatan;
- e. GOR Soekarno Hatta;
- f. Rumah sakit;
- g. Taman Kota; dan
- h. Ndalem Gebang.

Rencana ruang evakuasi sebagaimana dimaksud diatas berupa pengembangan fasilitas kebutuhan darurat pengungsi, meliputi: MCK, dapur umum, ruang perawatan, ruang pemberdayaan, dan ruang kebutuhan lainnya.

Mengacu pada perda tata ruang, khususnya yang menyangkut penanganan bencana, maka sasaran Dinas Sosial Kota Blitar adalah Penanggulangan bencana informal yaitu unsur Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat. Agar potensi Penanggulangan Bencana berfungsi secara optimal diperlukan proses pembelajaran agar lebih handal.

Untuk itu diperlukan upaya-upaya pelatihan dan pendidikan yang terorganisir, terukur dan sistematis. Tanpa pendidikan dan pelatihan maka dipastikan tidak terciptanya masyarakat yang handal dalam Penanggulangan Bencana sebagai bentuk kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana yang akan datang. Proses terbentuknya TAGANA sebagai potensi Penanggulangan Bencana berbasis masyarakat yang terlatih, maka salah satu pedoman pelatihan untuk mencapai tujuan akhir dari sebuah pelatihan yaitu TAGANA terlatih.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pemyusunan Renstra Dinas Sosial tahun 2021-2026 tidak terlepas dari dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2016. Dalam KLHS tersebut dijelaskan isu strategis bidang sosial di Kota Blitar merupakan kondisi sosial yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan sehingga kondisi sosial di Kota Blitar dapat menjadi lebih baik. Isu strategis di bidang sosial terdiri dari masalah kemiskinan, penurunan nilai sosial dan kebangsaan masyarakat, peningkatan ketahanan pangan serta tingkat kesehatan masyarakat yang menurun. Kondisi tersebut yang masih harus dikedepankan dan diperhatikan mengenai pembangunan di bidang sosial Kota Blitar pada tahun 2021-2026.

Salah satu isu pembangunan di bidang sosial adalah tentang kemiskinan yang merupakan salah satu dari long list atau daftar panjang isu pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan data statistik, jumlah penduduk miskin di Kota Blitar tahun 2020 mencapai 11.100 jiwa atau 7,78 persen dari total penduduk, bertambah sebanyak 1.000 jiwa atau naik sebesar 0,65 persen poin dibandingkan dengan tahun 2019 sebanyak 10.100 jiwa atau sebesar 7,13 persen. Tujuan pembangunan berkelanjutan diantaranya mengentaskan segala bentuk kemiskinan dengan mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional serta menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin melalui Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial dan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diupayakan untuk memperbaiki fungsi sosial PPKS sehingga mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya, menjalin hubungan yang serasi dengan lingkungannya secara wajar dan bermartabat. Sebaran PPKS dengan segala permasalahannya di Kota Blitar tahun 2020 masih tergolong tinggi yaitu sebanyak 12.203 tentunya memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Angka ini didominasi oleh kelompok fakir miskin yang mencapai 11.100 jiwa. Upaya mendorong kemandirian fakir miskin dilakukan melalui motivasi dan pendampingan yang intens dalam rangka menumbuhkan rasa percaya diri, mempermudah akses pemasaran dan kendala permodalan serta sinergitas program penanganan fakir miskin dengan Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Rehabilitasi sosial bagi PPKS dengan gangguan keterlantaran, kecacatan, dan ketunasosialan memerlukan peningkatan kualitas pemberi layanan terutama PSKS sebagai ujung tombak pelayanan sosial di masyarakat. Keterbatasan sarana dan prasarana menyebabkan kurang maksimalnya pelayanan sosial bagi PPKS yang memerlukan layanan lanjutan. Kondisi ini tidak didukung oleh sarana prasarana pelayanan sosial skala provinsi yang memadai baik kapasitas maupun persebarannya, sedangkan di Kota Blitar hanya ada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Anak yang tentunya pelayanannya sangat terbatas. Dari uraian permasalahan tersebut maka ditetapkan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih cukup tinggi;
2. Belum optimalnya kapasitas dan kualitas SDM Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam pelayanan kesejahteraan sosial;
3. Belum tersedianya Sarana Prasarana Pelayanan Sosial skala Kabupaten/Kota bagi PPKS terlantar.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja OPD selama lima tahun. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Dinas Sosial dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi guna memenuhi visi misi Walikota terpilih untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, setiap tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran Dinas Sosial 2022-2023 yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2022-2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran			
								2022		2023	
								Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori SAKIP PD berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	Nilai SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat daerah	Indeks	A (83,94)	A (84,35)	A (85,13)	A (84,39)	A (84,96)
		Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori SAKIP PD berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	Nilai SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat daerah	Indeks	A (83,94)	A (84,35)	A (85,13)	A (84,39)	A (84,96)
2.	Menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin		Indeks Keparahan Kemiskinan	Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin	Data resmi BPS	Indeks	0,22	0,25	0,19	0,24	0,24*)
		Meningkatnya penanganan fakir miskin	Persentase fakir miskin yang berdaya	Fakir miskin yang berdaya adalah fakir miskin alumni pelatihan keterampilan yang telah bekerja/ mulai merintis usaha mandiri	Jumlah fakir miskin peserta pelatihan thn n-1 yang bekerja/ mulai merintis usaha _____ x 100% Jumlah fakir miskin peserta Pelatihan thn n-1	%	18,18	10	15,71	10	45,83
3.	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat		Persentase PMKS	PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) adalah seseorang, keluarga	Jumlah PMKS _____ x 100% Jumlah penduduk	%	7,71	7,48	7,40	7,37	7,37*)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran			
								2022		2023	
								Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar, dengan 26 kategori sesuai Permensos RI no 8 th 2012							
		Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase penurunan PMKS	PMKS adalah PMKS dengan 26 kategori sesuai Permensos RI no 8 th 2012	$\frac{(\text{Jumlah PMKS thn } n-1) - (\text{Jumlah PMKS thn } n)}{\text{Jumlah PMKS thn } n-1} \times 100\%$	%	-7,31	1,45	6,09	1,47	1,47*)

*) Data prediksi

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja Tujuan / Sasaran			Kondisi Akhir Renstra
							2021	2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori SAKIP PD berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	Nilai SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat daerah	Indeks	A (85,13)	A (84,96)	A (85,00)	A (85,04)	A (85,08)	A (85,08)
		Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori SAKIP PD berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	Nilai SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat daerah	Indeks	A (85,13)	A (84,96)	A (85,00)	A (85,04)	A (85,08)	A (85,08)
2.	Meningkatnya kesejahteraan PPKS		Indeks Keparahan Kemiskinan	Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin	Data resmi BPS	Indeks	0,28	0,19	0,23	0,22	0,21	0,21
			Persentase PMKS	PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar, dengan 26 kategori sesuai Permensos RI no 8 th 2012	$\frac{\text{Jumlah PMKS}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	%	7,90	7,40	7,26	7,15	7,04	7,04

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja Tujuan / Sasaran			Kondisi Akhir Renstra
							2021	2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Persentase PPKS	PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar, dengan 26 kategori sesuai Permensos RI no 8 th 2012	$\frac{\text{Jumlah PPKS}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	%	7,90	7,40	7,26	7,15	7,04	7,04
		Meningkatnya penanganan PPKS	Persentase fakir miskin yang berdaya	Fakir miskin yang berdaya adalah fakir miskin yang telah menerima pelatihan keterampilan dan mulai merintis usaha/bekerja dan/atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos yang graduasi mandiri (kondisi sosial ekonominya sudah meningkat dan dikategorikan mampu sehingga sudah tidak layak lagi mendapatkan bantuan sosial)	$\frac{\text{(Akumulasi jumlah fakir miskin eks peserta pelatihan keterampilan sampai dengan thn n yang mulai merintis usaha/ bekerja + akumulasi KPM Bansos yang graduasi mandiri)}}{\text{Jumlah fakir miskin thn n}} \times 100\%$	%	0,16	0,66	2,32	2,77	3,24	3,24
					(Jumlah PMKS thn	%	-2,38	6,09	1,49	1,52	1,54	5,89

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja Tujuan / Sasaran			Kondisi Akhir Renstra
							2021	2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Persentase penurunan PMKS	PMKS adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan 26 kategori sesuai Permensos RI no 8 th 2012	$\frac{n-1 - (\text{Jumlah PMKS thn } n)}{\text{Jumlah PMKS thn } n-1} \times 100\%$							
			Persentase PPKS yang terpenuhi layanan dasar bidang sosial	PPKS adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial kewenangan kota dengan 24 kategori (sesuai Permensos RI no 8 th 2012 bukan korban HIV/Aids dan NAPZA)	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan dasar bidang sosial kewenangan kota}}{\text{Jumlah PPKS}} \times 100\%$	%		88,37	91,19	92,64	94,11	94,11

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran strategis akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan. Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah merupakan pedoman pelaksanaan tindakan (program dan kegiatan) yang akan dilaksanakan. Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok dan dapat dilaksanakan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Dalam penentuan kebijakan dilakukan dengan menarik strategi ke dalam 4 perspektif sesuai Permendagri 54 tahun 2010 yang terdiri dari perspektif masyarakat, perspektif internal, perspektif kelembagaan, dan perspektif keuangan.

Gambaran Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang disusun oleh Dinas Sosial Kota Blitar pada periode lima tahun mendatang disajikan pada tabel 5.1.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Sosial Kota Blitar

Visi RPJMD	KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat		
Misi RPJMD	Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital		
Tujuan RPJMD	Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat		
Sasaran RPJMD	1. Menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin 2. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat		
Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kesejahteraan PPKS	Meningkatnya penanganan PPKS	Peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan PPKS	Optimalisasi pelatihan dan pemenuhan kebutuhan dasar
			Pemberian program sosial ekonomi bagi warga miskin dan rentan miskin

		Peningkatan upaya rehabilitasi dan jaminan sosial	Peningkatan PMKS yang direhabilitasi, diberdayakan, dan menerima jaminan sosial
			Peningkatan validasi data PPKS
		Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Peningkatan pendampingan pekerja sosial
			Peningkatan kapasitas PSKS

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Blitar. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi sedangkan sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas layanan.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program, kegiatan dan sub kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input*, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program, kegiatan dan sub kegiatan.

Berikut disajikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Kota Blitar tahun 2021-2026. Masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan telah dilengkapi dengan sasaran berupa output kegiatan yang akan dicapai selama kurun waktu sampai dengan lima tahun yang masih bersifat indikasi sesuai dengan sumber daya yang tersedia setiap tahunnya. Keselarasan mulai dari tujuan sampai dengan sub kegiatan berikut target kinerja dan pendanaanya disajikan secara lengkap dalam tabel berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
1	Urusan Pemerintahan wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar										
1.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial										
	Tujuan 1 : Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Indikator tujuan : Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat daerah	-	A (83,94)	A (84,35)		A (85,13)		Dinas Sosial	Kota Blitar
	Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Indikator sasaran : Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat daerah	-	A (83,94)	A (84,35)		A (85,13)		Dinas Sosial	Kota Blitar
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun berjalan	Indeks	Baik 81,3	Baik 82	4.105.281.869	Baik 82,7	4.580.924.555	Sekretariat	Kota Blitar
1.06.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan ----- x 100% Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang seharusnya tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	%	100	100	12.981.800	100	43.946.500		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
1.06.01. 2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun pada tahun n	dok	6	6	7.931.600	6	4.279.100		
1.06.01. 2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan PD yang tersusun	Jumlah dokumen pelaporan PD yang tersusun pada tahun n	dok	11	11	5.050.200	11	39.667.400		
1.06.01. 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Jumlah jenis dokumen pelaporan keuangan PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan ----- x 100% Jumlah jenis dokumen pelaporan keuangan PD yang seharusnya tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	%	100	100	3.418.526.295	100	3.316.187.657		
1.06.01. 2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan pada tahun n	Org	26	27	3.413.594.895	27	3.311.256.257		
1.06.01. 2.02.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun (Bulanan/ Semesteran)	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun (Bulanan/ Semesteran) pada tahun n	dok	12	12	4.931.400	12	4.931.400		
1.06.01. 2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian yang terpenuhi ----- x 100% jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian	%	100	100	135.345.600	100	129.438.900		
1.06.01. 2.05.10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah publikasi program/ kegiatan perangkat daerah	Jumlah publikasi program/ kegiatan perangkat daerah pada tahun n	publk	2	2	135.345.600	2	129.438.900		
		Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti pada tahun n	even	1	3		3			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
1.06.01. 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Jumlah jenis kebutuhan administrasi umum yang tersedia ----- x 100% jumlah jenis kebutuhan administrasi umum	%	100	100	310.512.650	100	417.926.803		
1.06.01. 2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia pada tahun n	komp	5	5	13.089.900	5	13.874.800		
1.06.01. 2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi pada tahun n	jenis	2	1	8.000.000	8	103.547.100		
		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi (termasuk mebelair)	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi (termasuk mebelair) pada tahun n	jenis	4	0		4			
1.06.01. 2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia pada tahun n	jenis	29	34	21.100.100	35	30.091.450		
1.06.01. 2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia pada tahun n	dos	660	350	46.595.500	350	43.595.500		
		Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia pada tahun n	jenis	49	41		41			
1.06.01. 2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan yang tersedia	Jumlah jenis barang cetakan yang tersedia pada tahun n	jenis	9	10	26.215.100	10	28.208.400		
		Jumlah lembar penggandaan	Jumlah lembar penggandaan pada tahun n	lembar	53.000	38.060		38.060			
1.06.01. 2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah jenis bahan bacaan yang tersedia	Jumlah jenis bahan bacaan yang tersedia pada tahun n	Bahan bacaan	1	12	16.200.000	12	8.100.000		
1.06.01. 2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti pada tahun n	Rakor	30	40	179.312.050	61	190.509.553		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
1.06.01. 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Jumlah jasa penunjang urusan PD yang tersedia ----- x 100% Jumlah kebutuhan jasa Penunjang urusan PD	%	100	100	100.550.124	100	387.818.807		
1.06.01. 2.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis rekening yang terbayarkan	Jumlah jenis rekening yang terbayarkan pada tahun n	rek	4	48	96.800.124	48	65.209.361		
1.06.01. 2.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah iuran kebersihan yang terbayarkan	jumlah iuran kebersihan yang terbayarkan pada tahun n	iuran	12	12	3.750.000	12	322.609.446		
		Jumlah tenaga penunjang perkantoran yang tersedia	Jumlah tenaga penunjang perkantoran yang tersedia pada tahun n	orang	0	11		11			
1.06.01. 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Jumlah jenis BMD yang terpelihara ----- x 100% jumlah jenis BMD yang seharusnya terpelihara	%	100	100	127.365.400	100	285.605.888		
1.06.01. 2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya pada tahun n	unit	13	15	81.105.300	15	77.469.913		
		Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional terpelihara pada tahun n	unit	3	3		3			
1.06.01. 2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara pada tahun n	jenis	4	4	19.048.300	6	27.048.300		
1.06.01. 2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara pada tahun n	unit	1	1	12.500.000	1	166.375.875		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
1.06.01. 2.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (termasuk mebelair)	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (termasuk mebelair) pada tahun n	jenis	2	2	14.711.800	2	14.711.800		
	Tujuan 2 : Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Indikator tujuan : Persentase PMKS	Jumlah PMKS ----- x 100% Jumlah penduduk	%	7,71	7,48		7,40		Dinas Sosial	Kota Blitar
			PMKS adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan SOsial dengan 26 kategori sesuai Permensos no 8 tahun 2012								
	Sasaran 2 : Meningkatnya penanganan PMKS	Indikator sasaran : Persentase penurunan PMKS	(Jml PMKS thn n-1) – (Jml PMKS thn n) ----- x 100% Jumlah PMKS thn n-1	%	-7,31	1,45		6,09		Dinas Sosial	Kota Blitar
1.06.02	Program Pemberdayaan sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Jumlah PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial ----- x 100% Jumlah PSKS	%	100	100	1.277.630.700	100	1.478.463.616	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kota Blitar
			PSKS yang aktif adalah PSM dan TKSK yang terlibat langsung dalam pelayanan sosial (pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial) yang diselenggarakan Dinas Sosial minimal 75% dari seluruh jenis layanan								
1.06.02. 03	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan kesejahteraan sosial	Jumlah PSKS yang mendapatkan pembinaan kesejahteraan sosial -----x 100% Jumlah PSKS	%	100	100	1.277.630.700	100	1.478.463.616		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
			PSKS yang mendapatkan pembinaan kesejahteraan sosial adalah PSM, TKSK, Karang Taruna dan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mengikuti kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan Dinsos								
1.06.02. 03.04	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang mengikuti kegiatan peningkatan jejaring dan keterampilan guna peningkatan pelayanan PMKS	Jumlah PSKS yang mengikuti kegiatan peningkatan jejaring dan keterampilan guna peningkatan pelayanan PMKS pada tahun n	Org	47	50	1.277.630.700	72	1.478.463.616		
		Jumlah pengurus/ anggota Orsos, relawan sosial dan PSKS yang menerima tambahan kesejahteraan	Jumlah pengurus/ anggota Orsos, relawan sosial dan PSKS yang menerima tambahan kesejahteraan pada tahun n	Org	365	297		279			
		Jumlah peringatan HUT PETA yang difasilitasi	Jumlah peringatan HUT PETA yang difasilitasi pada tahun n	even	1	1		1			
		Jumlah perintis, janda perintis kemerdekaan yang menerima tali asih dan bingkisan lebaran	Jumlah perintis, janda perintis kemerdekaan yang menerima tali asih dan bingkisan lebaran pada tahun n	Org	5	4		4			
		Jumlah peringatan HKSN yang difasilitasi	Jumlah peringatan HKSN yang difasilitasi pada tahun n	even	0	1		1			
		Jumlah peringatan hari pahlawan yang difasilitasi	Jumlah peringatan hari pahlawan yang difasilitasi pada tahun n	even	1	1		1			
		Jumlah peringatan HLUN yang difasilitasi	Jumlah peringatan HLUN yang difasilitasi pada tahun n	even	1	1		1			
		Jumlah Juru Kunci Makam dan modin kematian yang dibina	Jumlah Juru Kunci Makam dan modin kematian yang dibina pada tahun n	Org	312	313		313			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
1.06.04	Program Rehabilitasi sosial	Persentase peningkatan PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	(Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabsos pada tahun n) – (Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabsos pada tahun n -1) ----- x 100% Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabsos pada tahun n -1	%	13,59	2,57	842.164.100	2,58	975.294.980	Bidang Pelayanan dan Rehabsos	Kota Blitar
			PMKS yang dimaksud adalah PMKS lainnya bukan fakir miskin, korban bencana alam, korban bencana sosial, korban penyalahgunaan Napza dan Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)								
1.06.04.2.01	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah anak terlantar dan Lansia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ----- x 100% Populasi anak terlantar dan Lansia terlantar di daerah Kab/Kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	%	100	100	505.723.700	100	494.179.400		
1.06.04.2.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Anak yang membutuhkan pelayanan sosial dan Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial yang mendapat bantuan permakanan	Jumlah Anak yang membutuhkan pelayanan sosial dan Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial yang mendapat bantuan permakanan pada tahun n	Org	0	125	335.029.400	125	335.029.800		
1.06.04.2.01.02	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Anak yang membutuhkan pelayanan sosial dan Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial yang mendapat bantuan sandang	Jumlah Anak yang membutuhkan pelayanan sosial dan Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial yang mendapat bantuan sandang pada tahun n	Org	9	10	4.902.400	11	4.902.400		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
1.06.04. 2.01.05	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Anak yang membutuh kan pelayanan sosial dan Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Jumlah Anak yang membutuh kan pelayanan sosial dan Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial pada tahun n	Org	20	40	110.256.800	82	110.256.800		
1.06.04. 2.01.12	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah adopsi anak yang difasilitasi	Jumlah adopsi anak yang difasilitasi pada tahun n	Org	1	3	55.535.100	4	47.990.400		
		Jumlah anak/orang terlantar yang mendapat pelayanan pemulangan ke daserah asal	Jumlah anak/orang terlantar yang mendapat pelayanan pemulangan ke daserah asal pada tahun n	Org	17	30		42			
		Jumlah Anak yang membutuh kan pelayanan sosial dan Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial yang mendapat kan pelayanan rujukan	Jumlah Anak yang membutuh kan pelayanan sosial dan Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial yang mendapat kan pelayanan rujukan pada tahun n	Org	4	10		16			
1.06.04. 2.02	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar dan Gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar dan Gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ----- x 100% Populasi penyandang disabilitas terlantar dan Gepeng di daerah Kab/ Kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	%	100	100	336.440.400	100	481.115.580		
1.06.04. 2.02.01	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah dokumen pendataan/ verbal data PMKS	Jumlah dokumen pendataan/ verbal data PMKS pada tahun n	dok	1	1	43.323.900	1	43.323.900		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
1.06.04. 2.02.07	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah psikotik yang bebas pasung	Jumlah psikotik yang bebas pasung pada tahun n	Org	3	3	208.406.000	3	353.231.180		
		Jumlah PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza (termasuk penyandang disabilitas terlantar dan gepeng) di Luar Panti Sosial yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Jumlah PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza (termasuk penyandang disabilitas terlantar dan gepeng) di Luar Panti Sosial yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial pada tahun n	Org	120	100		100			
		Jumlah klien hasil razia/penjaringan yang dibina	Jumlah klien hasil razia/penjaringan yang dibina pada tahun n	Org	36	20		20			
1.06.04. 2.02.135	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza (termasuk penyandang disabilitas terlantar, psikotik/eks psikotik dan Gepeng) di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan rujukan	Jumlah PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza (termasuk penyandang disabilitas terlantar, psikotik/eks psikotik dan Gepeng) di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan rujukan pada tahun n	org	8	68	84.710.500	87	84.560.500		
1.06.06	Program Penanganan bencana	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (SPM)	Jumlah korban bencana alam dan sosial daerah Kab/Kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya ----- x 100% Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kab/Kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota	%	100	100	345.017.300	100	445.773.700	Bidang Linjamsos	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
1.06.06. 2.01	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang memperoleh bantuan sosial	Jumlah korban bencana alam/sosial skala Kab/ Kota yang memperoleh bantuan sosial ----- x 100% Jumlah korban bencana alam/sosial skala Kab/ Kota yang seharusnya memperoleh bantuan sosial	%	100	100	56.478.200	100	232.608.400		
1.06.06. 2.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah ketersediaan Bufferstock untuk penanganan pasca bencana	Jumlah ketersediaan Bufferstock untuk penanganan pasca bencana pada tahun n	paket	11	37	20.230.200	668	207.535.400		
1.06.06. 2.01.04	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah warga miskin yang sakit/mendapat musibah lainnya yang mendapatkan bantuan	Jumlah warga miskin yang sakit/mendapat musibah lainnya yang mendapatkan bantuan pada tahun n	Org	34	76	36.248.000	50	25.073.000		
1.06.06. 2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase TAGANA yang terampil dalam penanganan pasca bencana	Jumlah anggota Tagana yang terampil dalam penanganan pasca bencana ----- x 100% Jumlah anggota Tagana	%	78	81	288.539.100	88	213.165.300		
			Tagana yang terampil adalah Tagana yang telah lulus uji kompetensi sertifikasi Tagana tingkat nasional								
1.06.06. 2.02.02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah peserta pembinaan anggota Tagana dan kegiatan ketanggap darurat	Jumlah peserta pembinaan anggota Tagana dan kegiatan ketanggap darurat pada tahun n	Org	32	32	288.539.100	25	213.165.300		
		Jumlah peserta kegiatan Tagana masuk sekolah	Jumlah peserta kegiatan Tagana masuk sekolah pada tahun n	Org	300	150		150			
		Jumlah Tagana yang mendapatkan tambahan kesejahteraan	Jumlah Tagana yang mendapatkan tambahan kesejahteraan pada tahun n	Org	32	32		25			
		Jumlah peserta Diklat/Bimtek relawan kebencanaan	Jumlah peserta Diklat/Bimtek relawan kebencanaan pada tahun n	Org	55	32		25			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
		Jumlah pemeliharaan/ pengadaan Sarpras lapangan untuk siaga bencana	Jumlah pemeliharaan/ pengadaan Sarpras lapangan untuk siaga bencana pada tahun n	Unit	2	2		2			
		Jumlah peserta kegiatan HUT Tagana	Jumlah peserta kegiatan HUT Tagana pada tahun n	Org	0	100		100			
		Jumlah kegiatan dapur umum lapangan	Jumlah kegiatan dapur umum lapangan pada tahun n	even	1	1		1			
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase TMP dalam kondisi baik	Jumlah TMP dalam kondisi baik ----- x 100% Jumlah TMP	%	100	100	62.127.960	100	83.546.100	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kota Blitar
1.06.07. 2.01	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase TMP yang terpelihara	Jumlah TMP yang terpelihara ----- x 100% Jumlah TMP	%	100	100	62.127.960	100	83.546.100		
1.06.07. 2.01.02	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang dipelihara	Jumlah TMP yang dipelihara pada tahun n	Unit	1	1	62.127.960	1	83.546.100		
	Tujuan 3 : Menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin	Indikator tujuan : Indeks Keparahana Kemiskinan	Data resmi dari BPS	Indeks	0,22	0,25		0,19		Dinas Sosial	Kota Blitar
			Indeks Keparahana Kemiskinan adalah Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin								
	Sasaran 3 : Meningkatnya penanganan fakir miskin	Indikator sasaran : Persentase fakir miskin yang berdaya	Jumlah fakir miskin peserta pelatihan thn n-1 yang bekerja/ mulai merintis usaha ----- x 100% Jumlah fakir miskin peserta Pelatihan thn n-1	%	18,18	10		15,71		Dinas Sosial	Kota Blitar
			Fakir miskin yang berdaya adalah fakir miskin alumni pelatihan keterampilan yang telah bekerja/mulai merintis usaha mandiri								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
1.06.05	Program Perlindungan dan jaminan sosial	Persentase penurunan Rumah Tangga tidak mampu yang memperoleh bantuan sosial	(Jumlah RTM penerima Bansos tahun n-1) – (Jumlah RTM penerima Bansos tahun n) ----- x 100% Jumlah RTM penerima Bansos tahun n-1	%	2,35	1,36	18.792.409.200	1,82	20.169.171.952	Bidang Linjamsos	Kota Blitar
			RTM penerima Bansos adalah Keluarga Penerima Manfaat Bansos Rastrada								
		Persentase peningkatan PMKS terlatih	(Jumlah akumulasi PMKS yang terlatih tahun n) – (Jumlah akumulasi PMKS terlatih tahun n-1) ----- x 100% Jumlah akumulasi PMKS terlatih tahun n-1	%	28,79	32		50		Bidang Pemberdayaan Sosial	Kota Blitar
			PMKS terlatih adalah PMKS yang mendapatkan pelatihan keterampilan								
1.06.05. 2.02	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak yatim dan/atau piatu yang memperoleh bantuan sosial	Jumlah anak yatim dan/atau piatu yang memperoleh bantuan sosial ----- x 100% Jumlah anak yatim dan/atau piatu yang seharusnya memperoleh bantuan sosial	%	100	100	18.792.409200	100	20.169.171.952	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kota Blitar
		Persentase data DTKS yang diverval	Jumlah data DTKS yang diverifikasi dan divalidasi ----- x 100% Jumlah data DTKS yang seharusnya diverifikasi dan divalidasi	%	100	100		100		Bidang Linjamsos	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
		Persentase Rumah Tangga Tidak Mampu yang memperoleh bantuan sosial	Jumlah Rumah Tangga Tidak Mampu yang memperoleh bantuan sosial ----- x 100% Jumlah Rumah Tangga Tidak Mampu yang seharusnya memperoleh bantuan sosial	%	100	100		100		Bidang Linjamsos	Kota Blitar
		Persentase PMKS terlatih	Jumlah PMKS yang mendapatkan pelatihan pada tahun n ----- x 100% Jumlah PMKS yang seharusnya mendapatkan pelatihan sampai dengan tahun akhir periode Renstra	%	20,32	20		30		Bidang Pemberdayaan Sosial	Kota Blitar
1.06.05. 2.02.01	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak yatim yang difasilitasi mendapatkan bantuan	Jumlah anak yatim yang difasilitasi mendapatkan bantuan pada tahun n	Org	534	550	898.118.900	592	948.418.350	Bidang Pemberdayaan Sosial	
			Anak yatim dan/atau piatu adalah anak yatim dan/atau piatu yang berusia 0-12 tahun								
		Jumlah SLRT yang terfasilitasi	Jumlah SLRT yang terfasilitasi pada tahun n	Unit	0	1		1			
1.06.05. 2.02.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan verifikasi dan validasi DTKS	Jumlah laporan verifikasi dan validasi DTKS pada tahun n	laporan	1	1	244.077.900	1	233.091.000	Bidang Linjamsos	
		Jumlah laporan verifikasi dan validasi data peserta PBI JKN	Jumlah laporan verifikasi dan validasi data peserta PBI JKN pada tahun n	laporan	1	1		1			
		Jumlah warga miskin yang mendapat pelayanan Surat Pernyataan Miskin	Jumlah warga miskin yang mendapat pelayanan Surat Pernyataan Miskin pada tahun n	Org	971	500		0			
1.06.05. 2.02.03	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah rumah tangga tidak mampu yang menerima bantuan beras	Jumlah rumah tangga tidak mampu yang menerima bantuan beras pada tahun n	RTM	11.165	11.000	17.423.041.800	10.814	18.192.938.490	Bidang Linjamsos	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
			Rumah Tangga Tidak Mampu (RTM) adalah Keluarga Penerima Manfaat Beras Sejahtera Daerah (Rastrada)								
		Jumlah rumah tangga tidak mampu yang mendapatkan tambahan kesejahteraan	Jumlah rumah tangga tidak mampu yang mendapatkan tambahan kesejahteraan pada tahun n	RTM	11.165	11.000		10.814			
		Jumlah KPM Program Sembako/BSP yang difasilitasi mendapatkan bantuan sosial	Jumlah KPM Program Sembako/BSP yang difasilitasi mendapatkan bantuan sosial pada tahun n	KPM	4.426	3.469		7.796			
1.06.05. 2.02.04	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah PMKS yang memperoleh pelatihan ketrampilan	Jumlah PMKS yang memperoleh pelatihan ketrampilan pada tahun n	Org	170	80	227.170.600	120	794.724.112	Bidang Pemberdayaan Sosial	
			PMKS peserta pelatihan adalah fakir miskin usia produktif yang terdata dalam DTKS dan/atau PMKS Lainnya								
		Jumlah KUBE yang dibentuk/ dibina	Jumlah KUBE yang dibentuk/ dibina pada tahun n	KUBE	0	1		1			
		Jumlah peserta workshop kewirausahaan bagi fakir miskin	Jumlah peserta workshop kewirausahaan bagi fakir miskin pada tahun n	Org	92	80		70			
			Peserta workshop kewirausahaan adalah alumni peserta pelatihan tahun n-1								

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Dinas Sosial Kota Blitar 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023			
					K	Rp		
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar							
1.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial							
	Tujuan 1 : Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	<u>Indikator tujuan</u> : Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat daerah	-	A (84,39)		Dinas Sosial	Kota Blitar
	Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja perangkat daerah	<u>Indikator sasaran</u> : Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat daerah	-	A (84,39)		Dinas Sosial	Kota Blitar
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun berjalan	Indeks	Baik 82,4	4.275.998.547	Sekretariat	Kota Blitar
1.06.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar ----- x 100% Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang harus tersusun	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar	%	100	13.630.890		
1.06.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun berjalan	Dokumen	6	8.328.180		
1.06.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	Laporan	12	5.302.710		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023			
					K	Rp		
	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada tahun berjalan					
1.06.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Jml administrasi keuangan perangkat daerah yang terlayani sesuai standar ----- x 100 % Jml administrasi keuangan perangkat daerah yang harus dilayani	%	100	3.182.042.694		
1.06.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun berjalan	Orang/bulan	27	3.176.864.724		
1.06.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD pada tahun berjalan	Laporan	12	5.177.970		
1.06.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Jumlah jenis administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang terlayanan sesuai standar ----- x 100% jumlah jenis administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang harus dilayani	%	100	142.112.880		
1.06.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pegawai pada tahun berjalan	Paket	2	35.000.000		
1.06.01.2.05.10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun berjalan	Orang	28	107.112.880		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023			
					K	Rp		
1.06.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar ----- x 100% Jumlah jenis administrasi umum yang harus disediakan	%	100	326.038.283		
1.06.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	14.568.540		
1.06.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	3	13.000.000		
1.06.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	5	22.380.960		
1.06.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	10	32.775.275		
1.06.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	29.625.855		
1.06.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan pada tahun berjalan	Dokumen	12	17.010.000		
1.06.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada tahun berjalan	Laporan	40	196.677.653		
1.06.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia sesuai kebutuhan ----- x 100 %	%	100	8.400.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023			
					K	Rp		
			Jumlah BMD penunjang urusan yang dibutuhkan					
1.06.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	Unit	2	8.400.000		
1.06.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Jumlah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar ----- x 100 % Jml penunjang urusan pemerintahan yang harus disediakan	%	100	470.040.130		
1.06.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun berjalan	Laporan	48	101.640.130		
1.06.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Laporan	13	368.400.000		
1.06.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Jumlah jenis BMD yang terpelihara ----- x 100% jumlah jenis BMD yang seharusnya terpelihara	%	100	133.733.670		
1.06.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun berjalan	Unit	15	85.160.565		
1.06.01.2.09.05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara pada tahun berjalan	Unit	4	3.000.000		
1.06.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun berjalan	Unit	40	20.000.715		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023			
					K	Rp		
1.06.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi pada tahun berjalan	Unit	1	13.125.000		
1.06.01.2.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pada tahun berjalan	Unit	1	12.447.390		
	Tujuan 2 : Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Indikator tujuan : Persentase PMKS	Jumlah PMKS ----- x 100% Jumlah penduduk	%	7,37		Dinas Sosial	Kota Blitar
			PMKS adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan 26 kategori sesuai Permensos RI no 8 tahun 2012					
	Sasaran 2 : Meningkatnya penanganan PMKS	Indikator sasaran : Persentase penurunan PMKS	(Jml PMKS thn n-1) – (Jml PMKS thn n) ----- x 100% Jumlah PMKS thn n-1	%	1,47		Dinas Sosial	Kota Blitar
1.06.02	Program Pemberdayaan sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Jumlah PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial ----- x 100% Jumlah PSKS	%	100	1.341.512.235	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kota Blitar
			PSKS yang aktif adalah PSM dan TKSK yang terlibat langsung dalam pelayanan sosial (pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial) yang diselenggarakan Dinas Sosial minimal 75% dari seluruh jenis layanan					
1.06.02.2.03	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan kesejahteraan sosial	Jumlah PSKS yang mendapatkan pembinaan kesejahteraan sosial -----x 100% Jumlah PSKS	%	100	1.341.512.235		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023			
					K	Rp		
			PSKS yang mendapatkan pembinaan kesejahteraan sosial adalah PSM, TKSK, Karang Taruna dan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mengikuti kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan Dinsos					
1.06.02.2.03.04	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun berjalan	Lembaga	7	1.341.512.235		
1.06.04	Program Rehabilitasi sosial	Persentase peningkatan PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	(Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabsos pada tahun n) – (Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabsos pada tahun n -1) ----- x 100% Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabsos pada tahun n -1	%	0,89	884.272.305	Bidang Pelayanan dan Rehabsos	Kota Blitar
			PMKS yang dimaksud adalah PMKS lainnya bukan fakir miskin, korban bencana alam, korban bencana sosial, korban penyalahgunaan Napza dan Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)					
1.06.04.2.01	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah anak terlantar dan Lansia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ----- x 100% Populasi anak terlantar dan Lansia terlantar di daerah Kab/Kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	%	100	531.009.885		
1.06.04.2.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan	Orang	125	351.780.870		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023			
					K	Rp		
		Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun berjalan					
1.06.04.2.01.02	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun berjalan	Orang	10	5.147.520		
1.06.04.2.01.05	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun berjalan	Orang	60	115.769.640		
1.06.04.2.01.12	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun berjalan	Orang	40	58.311.855		
1.06.04.2.02	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar dan Gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar dan Gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ----- x 100% Populasi penyandang disabilitas terlantar dan Gepeng di daerah Kab/ Kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	%	100	353.262.420		
1.06.04.2.02.07	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun berjalan	Orang	255	264.316.395		
1.06.04.2.02.13	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun berjalan	orang	55	88.946.025		
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan	Jumlah korban bencana alam dan sosial daerah Kab/Kota yang terpenuhi	%	100	362.268.165	Bidang Linjamsos	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023			
					K	Rp		
		dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (SPM)	kebutuhan dasarnya ----- x 100% Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kab/Kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota					
1.06.06.2.01	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang memperoleh bantuan sosial	Jumlah korban bencana alam/sosial skala Kab/Kota yang memperoleh bantuan sosial ----- x 100% Jumlah korban bencana alam/sosial skala Kab/Kota yang seharusnya memperoleh bantuan sosial	%	100	59.302.110		
1.06.06.2.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun berjalan	Orang	30	21.241.710		
1.06.06.2.01.04	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun berjalan	Orang	70	38.060.400		
1.06.06.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase TAGANA yang terampil dalam penanganan pasca bencana	Jumlah anggota Tagana yang terampil dalam penanganan pasca bencana ----- x 100% Jumlah anggota Tagana	%	84	302.966.055		
			Tagana yang terampil adalah Tagana yang telah lulus uji kompetensi sertifikasi Tagana tingkat nasional					
1.06.06.2.02.02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi,	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan	Orang	25	302.966.055		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023			
					K	Rp		
	Taruna Siaga Bencana	Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun berjalan					
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase TMP dalam kondisi baik	Jumlah TMP dalam kondisi baik ----- x 100% Jumlah TMP	%	100	65.234.358	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kota Blitar
1.06.07.2.01	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase TMP yang terpelihara	Jumlah TMP yang terpelihara ----- x 100% Jumlah TMP	%	100	65.234.358		
1.06.07.2.01.02	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota pada tahun berjalan	makam	974	65.234.358		
	Tujuan 3 : Menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin	Indikator tujuan : Indeks Keparahan Kemiskinan	Data resmi dari BPS	Indeks	0,24		Dinas Sosial	Kota Blitar
			Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin					
	Sasaran 3 : Meningkatnya penanganan fakir miskin	Indikator sasaran : Persentase fakir miskin yang berdaya	Jumlah fakir miskin peserta pelatihan thn n-1 yang bekerja/ mulai merintis usaha ----- x 100% Jumlah fakir miskin peserta Pelatihan thn n-1	%	10		Dinas Sosial	Kota Blitar
			Fakir miskin yang berdaya adalah fakir miskin alumni pelatihan keterampilan yang telah bekerja/mulai merintis usaha mandiri					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023			
					K	Rp		
1.06.05	Program Perlindungan dan jaminan sosial	Persentase penurunan Rumah Tangga tidak mampu yang memperoleh bantuan sosial	(Jumlah RTM penerima Bansos tahun n-1) – (Jumlah RTM penerima Bansos tahun n) ----- x 100% Jumlah RTM penerima Bansos tahun n-1	%	1,38	19.750.900.365	Bidang Linjamsos	Kota Blitar
			RTM penerima Bansos adalah Keluarga Penerima Manfaat Bansos Rastrada					
		Persentase peningkatan PMKS terlatih	(Jumlah akumulasi PMKS yang terlatih tahun n) – (Jumlah akumulasi PMKS terlatih tahun n-1) ----- x 100% Jumlah akumulasi PMKS terlatih tahun n-1	%	24,2			
			PMKS terlatih adalah PMKS yang mendapatkan pelatihan keterampilan					
1.06.05.2.02	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data DTKS yang diverval	Jumlah data DTKS yang diverifikasi dan divalidasi ----- x 100% Jumlah data DTKS yang seharusnya diverifikasi dan divalidasi	%	100	19.750.900.365		
		Persentase Rumah Tangga Tidak Mampu yang memperoleh bantuan sosial	Jumlah Rumah Tangga Tidak Mampu yang memperoleh bantuan sosial ----- x 100% Jumlah Rumah Tangga Tidak Mampu yang seharusnya memperoleh bantuan sosial	%	100			
		Persentase PMKS terlatih	Jumlah PMKS yang mendapatkan pelatihan pada tahun n ----- x 100% Jumlah PMKS yang	%	20			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023			
					K	Rp		
			seharusnya mendapatkan pelatihan sampai dengan tahun akhir periode Renstra					
1.06.05.2.02.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota pada tahun berjalan	Keluarga	100	256.596.795		
			Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota adalah jumlah penerima layanan Yandumaskin					
1.06.05.2.02.03	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun berjalan	Keluarga	10.714	19.255.564.440		
			Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota adalah Jumlah rumah tangga tidak mampu yang menerima bantuan beras sejahtera daerah					
1.06.05.2.02.03	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun berjalan	Orang	80	238.739.130		
			Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota adalah PPKS yang mendapatkan bantuan sarana/peralatan usaha					

Tabel 6.3
Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Dinas Sosial Kota Blitar 2024-2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/kegiatan/sub kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar													
1.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial													
	Tujuan 1 : Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat daerah	-	A (85,00)		A (85,04)		A (85,08)		A (85,08)		Dinas Sosial	Kota Blitar
	Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat daerah	-	A (85,00)		A (85,04)		A (85,08)		A (85,08)		Dinas Sosial	Kota Blitar
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun berjalan	Indeks	Baik 83,70	4.489.798.475	Baik 84,03	4.714.288.399	Baik 84,60	4.950.002.818	Baik 84,60	22.535.730.108	Sekretariat	Kota Blitar
1.06.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar	%	100	14.312.435	100	15.028.056	100	15.779.459	100	71.732.640		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/kegiatan/sub kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		waktu dan sesuai standar	----- x 100% Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang harus tersusun											
1.06.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun berjalan	Dokumen	7	8.744.589	6	9.181.818	6	9.640.909	25	43.827.096		
1.06.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada tahun berjalan	Laporan	12	5.567.846	12	5.846.238	12	6.138.550	48	27.905.544		
1.06.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Jml administrasi keuangan perangkat daerah yang terlayani sesuai standar ----- x 100 % Jml administrasi keuangan perangkat daerah yang harus dilayani	%	100	3.363.564.828	100	3.495.963.073	100	3.766.681.223	100	17.226.778.113		
1.06.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun berjalan	Orang/bulan	26	3.358.127.959	26	3.490.254.361	26	3.760.687.075	26	17.199.529.014		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/kegiatan/sub kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.06.01.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD pada tahun berjalan	Laporan	12	5.436.869	12	5.708.712	12	5.994.148	48	27.249.099		
1.06.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Jumlah jenis administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang terlayanan sesuai standar ----- x 100% jumlah jenis administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang harus dilayani	%	100	149.218.524	100	156.679.450	100	164.513.423	100	747.869.877		
1.06.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pegawai pada tahun berjalan	Paket	2	40.000.000	2	45.000.000	2	50.000.000	8	170.000.000		
1.06.01.2.05.0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun berjalan	Orang	26	109.218.524	26	111.679.450	26	114.513.423	26	577.869.877		
1.06.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar ----- x 100% Jumlah jenis administrasi umum yang harus disediakan	%	100	342.340.197	100	369.457.206	100	352.430.067	100	1.700.778.403		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/kegiatan/sub kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.06.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	15.296.967	1	16.061.815	1	16.864.906	4	75.882.128		
1.06.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	3	15.000.000	3	17.000.000	3	19.000.000	12	72.000.000		
1.06.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	5	23.500.008	5	24.675.008	5	25.908.759	20	117.564.8355		
1.06.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	10	33.064.039	10	33.467.241	10	33.990.603	40	179.892.658		
1.06.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	31.107.148	1	32.662.505	1	34.295.630	4	153.906.238		
1.06.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan pada tahun berjalan	Dokumen	12	17.860.500	12	18.753.525	12	19.691.201	48	89.515.226		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/kegiatan/sub kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.06.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada tahun berjalan	Laporan	40	206.511.535	40	201.837.112	40	202.678.968	160	987.017.318		
1.06.01.2.06.0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada tahun berjalan	Dokumen			2000	25.000.000			2000	25.000.000		
1.06.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia sesuai kebutuhan ----- x 100 % Jumlah BMD penunjang urusan yang dibutuhkan	%	100	8.820.000	100	49.261.000	100	9.724.050	100	76.205.050		
1.06.01.2.07.0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Jumlah paket mebel yang disediakan pada tahun berjalan	Paket			2	40.000.000			2	40.000.000		
1.06.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	Unit	2	8.820.000	2	9.261.000	2	9.724.050	8	36.205.050		
1.06.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Jumlah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar ----- x 100 % Jml penunjang urusan pemerintahan yang harus disediakan	%	100	475.122.137	100	480.458.243	100	486.061.156	100	2.012.231.790		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/kegiatan/sub kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.06.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun berjalan	Laporan	48	106.722.137	48	112.058.243	48	117.661.156	192	534.881.790		
1.06.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Laporan	13	368.400.000	13	368.400.000	13	368.400.000	52	1.477.350.000		
1.06.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Jumlah jenis BMD yang terpelihara ----- x 100% jumlah jenis BMD yang seharusnya terpelihara	%	100	136.420.000	100	147.441.371	100	154.813.440	100	699.774.235		
1.06.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun berjalan	Unit	15	89.418.593	15	93.889.523	17	98.583.999	17	448.157.980		
1.06.01.2.09.0005	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara pada tahun berjalan	Unit	-	-	4	5.000.000	4	6.000.000	12	14.000.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/kegiatan/sub kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.06.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun berjalan	Unit	40	21.000.751	40	22.050.788	40	23.153.328	160	105.253.882		
1.06.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi pada tahun berjalan	Unit	1	13.781.250	1	14.470.313	1	15.193.828	1	69.070.391		
1.06.01.2.09.0011	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pada tahun berjalan	Unit	1	12.219.760	1	12.030.747	1	11.882.285	4	63.291.982		
	Tujuan 2 : Meningkatnya kesejahteraan PPKS	Indikator 1 : Indeks keparahan kemiskinan	Data resmi dari BPS	Indeks	0,23		0,22		0,21		0,21			
			Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin											
		Indikator 2 : Persentase PMKS	Jumlah PMKS ----- x 100% Jumlah penduduk	%	7,26		7,15		7,04		7.04			

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/kegiatan/sub kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Indikator 2 : Persentase penurunan PMKS	(Jml PMKS thn n-1) – (Jml PMKS thn n) ----- x 100% Jumlah PMKS thn n-1	%	1,49		1,52		1,54		5,89			
			PMKS adalah Penyandang Kesejahteraan Sosial Masyarakat dengan 26 kategori sesuai Permensos RI no 8 th 2012											
		Indikator 3 : Persentase PPKS yang terpenuhi layanan dasar bidang sosial	Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan dasar bidang sosial kewenangan kota ----- x 100% Jumlah PPKS	%	91,19		92,64		94,11		94,11			
			- PPKS adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial kewenangan kota dengan 24 kategori (sesuai Permensos RI no 8 th 2012 bukan korban HIV/Aids dan NAPZA) - PPKS yang terpenuhi layanan dasar bidang sosial adalah PPKS yang mendapatkan satu atau lebih layanan dasar bidang sosial kewenangan Kab/Kota											
1.06.02	Program Pemberdayaan sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Jumlah PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial ----- x 100% Jumlah PSKS	%	100	1.408.587.847	100	1.479.017.239	100	1.552.968.101	100	7.059.716.122	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/kegiatan/sub kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			PSKS yang aktif adalah PSKS yang sudah membantu pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan dasar PPKS											
1.06.02.2.03	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan kesejahteraan sosial	Jumlah PSKS yang mendapatkan pembinaan kesejahteraan sosial -----x 100% Jumlah PSKS	%	100	1.408.587.847	100	1.479.017.239	100	1.552.968.101	100	7.059.716.122		
			PSKS yang mendapatkan pembinaan kesejahteraan sosial adalah PSM, TKSK, Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Orsos yang mengikuti kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan Dinsos											
1.06.02.2.03.0004	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun berjalan	Lembaga	5	1.408.587.847	5	1.479.017.239	5	1.552.968.101	5	7.059.716.122		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/kegiatan/sub kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.06.04	Program Rehabilitasi sosial	Persentase peningkatan PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	(Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabsos pada tahun n) – (Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabsos pada tahun n -1) ----- x 100% Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabsos pada tahun n -1	%	0,89	928.485.920	0,88	974.910.216	0,87	1.023.655.727	19,69	4.653.488.268	Bidang Pelayanan dan Rehabsos	Kota Blitar
			PMKS yang dimaksud adalah PMKS lainnya bukan fakir miskin, korban bencana alam, korban bencana sosial, korban penyalahgunaan Napza dan Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)											
1.06.04.2.01	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah anak terlantar dan Lansia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ----- x 100% Populasi anak terlantar dan Lansia terlantar di daerah Kab/Kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	%	100	557.560.379		974.910.216		1.023.655.727	100	3.592.859.907		
		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, Lanjut Usia terlantar dan Gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, Lansia terlantar Dan Gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ----- x 100% Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, Lansia terlantar Dan Gepeng di daerah Kab/Kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti				100		100		100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/kegiatan/sub kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.06.04.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun berjalan	Orang	130	369.369.914	140	381.500.000	145	389.000.000	145	1.826.680.184		
1.06.04.2.01.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun berjalan	Orang	10	5.404.896	30	11.375.141	35	12.458.898	85	39.288.855		
1.06.04.2.01.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan Kewenangan kabupaten/kota pada tahun berjalan	Orang			8	20.000.000	12	22.000.000	20	42.000.000		
1.06.04.2.01.0005	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun berjalan	Orang	75	121.558.122	200	235.763.263	205	257.227.427	540	840.575.252		
1.06.04.2.01.0006	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun berjalan	Orang			110	50.500.000	120	57.000.000	230	107.500.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/kegiatan/sub kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.06.04.2.01.0007	Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun berjalan	Orang			9	3.500.000	10	4.250.000	19	7.750.000		
1.06.04.2.01.0008	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/ Kota pada tahun berjalan	Orang			35	79.500.000	40	83.000.000	75	162.500.000		
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun berjalan	Orang			50	56.920.000	55	58.000.000	105	114.920.000		
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun berjalan	Orang			5	5.000.000	7	7.000.000	12	12.000.000		
1.06.04.2.01.0012	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun berjalan	Orang	43	61.227.447	73	130.851.812	85	133.719.402	256	439.645.616		

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/kegiatan/sub kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Indikator 2 : Persentase peningkatan PMKS terlatih	(Jumlah akumulasi PMKS yang terlatih tahun n) – (Jumlah akumulasi PMKS terlatih tahun n-1) ----- x 100% Jumlah akumulasi PMKS terlatih tahun n-1	%	19,5		16,3		14,04		160			
			PMKS terlatih adalah PMKS yang mendapatkan pelatihan keterampilan											
1.06.05.2.02	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Indikator 1 : Persentase data DTKS yang diverval	Jumlah data DTKS yang diverifikasi dan divalidasi ----- x 100% Jumlah data DTKS yang seharusnya diverifikasi dan divalidasi	%	100	20.738.445.383	100	21.775.367.652	100	21.772.466.899	100	102.829.589.499		
		Indikator 2 : Persentase Rumah Tangga Tidak Mampu yang memperoleh bantuan sosial	Jumlah Rumah Tangga Tidak Mampu yang memperoleh bantuan sosial ----- x 100% Jumlah Rumah Tangga Tidak Mampu yang seharusnya memperoleh bantuan sosial	%	100		100		100		100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/kegiatan/sub kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Indikator 3 : Persentase PMKS terlatih	Jumlah PMKS yang mendapatkan pelatihan pada tahun n ----- x 100% Jumlah PMKS yang seharusnya mendapatkan pelatihan sampai dengan tahun akhir periode Renstra	%	20		20		20		100			
1.06.05.2.02.0002	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/ Kota pada tahun berjalan	Keluarga	100	269.426.635	100	282.897.966	100	297.042.865	400	1.350.042.161		
			Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/ Kota adalah jumlah penerima layanan Yandumaskin											
1.06.05.2.02.0003	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun berjalan	Keluarga	10.564	20.218.342.661	10.414	21.229.259.795	10.264	21.199.053.649	10.264	99.325.262.345		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/kegiatan/sub kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota adalah Jumlah rumah tangga tidak mampu yang menerima bantuan beras sejahtera daerah											
1.06.05.2.02.0004	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun berjalan	Orang	80	250.676.087	80	263.209.891	80	276.370.385	400	1.256.166.093		
			Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota adalah PPKS yang mendapatkan bantuan sarana/peralatan usaha											
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Jumlah korban bencana alam dan sosial daerah Kab/Kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya ----- x 100% Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kab/Kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota	%	100	380.381.573	100	399.400.652	100	419.370.685	100	1.906.438.375	Bidang Linjamsos	Kota Blitar

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/kegiatan/sub kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.06.06.2.02.0002	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun berjalan	Orang	27	318.114.357	27	334.020.076	27	350.721.080	27	1.594.360.668		
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase TMP dalam kondisi baik	Jumlah TMP dalam kondisi baik ----- x 100% Jumlah TMP	%	100	68.496.076	100	71.920.880	100	75.516.924	100	343.296.198	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kota Blitar
			Taman Makam Pahlawan dalah Taman Makam Pahlawan Raden Wijaya											
1.06.07.2.01	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase TMP yang terpelihara	Jumlah TMP yang terpelihara ----- x 100% Jumlah TMP	%	100	68.496.076	100	71.920.880	100	75.516.924	100	343.296.198		
1.06.07.2.01.0002	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota pada tahun berjalan	makam	977	68.496.076	980	71.920.880	983	75.516.924	983	343.296.198		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota Blitar maka ditetapkan tujuan dan sasaran RPJMD yang selanjutnya dijabarkan dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah. Berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Blitar maka ditetapkan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial beserta indikator kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2022-2023
Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Sasaran RPJMD	Tujuan dan Sasaran Renstra	Indikator	Target Kinerja	
				2022	2023
1.	Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah	Tujuan : Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah	Indikator Tujuan : Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,35)	A (84,39)
		Sasaran : Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Indikator Sasaran : Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,35)	A (84,39)
2.	Menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin	Tujuan : Menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin	Indikator Tujuan : Indeks Keparahan Kemiskinan	0,25	0,24
		Sasaran : Meningkatnya penanganan fakir miskin	Indikator Sasaran : Persentase fakir miskin yang berdaya	10%	10%
3.	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Tujuan : Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Tujuan : Persentase PMKS	7,48%	7,37%
		Sasaran : Meningkatnya penanganan PMKS	Sasaran : Persentase penurunan PMKS	1,45%	1,47%

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2024-2026
Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Sasaran RPJMD	Tujuan dan Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			
					2024	2025	2026	Akhir Periode Renstra
1.	Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah	Tujuan : Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah	Indikator Tujuan : Nilai SAKIP Perangkat Daerah		A (85,00)	A (85,04)	A (85,08)	A (85,08)
		Sasaran : Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Indikator Sasaran : Nilai SAKIP Perangkat Daerah		A (85,00)	A (85,04)	A (85,08)	A (85,08)
2.	- Menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin - Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Tujuan : Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Indikator Tujuan 1 : Indeks Keparahan Kemiskinan		0,23	0,22	0,21	0,21
			Indikator Tujuan 2 : Persentase PMKS		7,26	7,15	7,04	7,04
			Indikator Tujuan 3 : Persentase PPKS		7,26	7,15	7,04	7,04

No	Sasaran RPJMD	Tujuan dan Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			
					2024	2025	2026	Akhir Periode Renstra
		Sasaran : Meningkatnya penanganan PPKS	Indikator Sasaran 1 : Persentase fakir miskin yang berdaya		2,32	2,77	3,24	3,24
			Indikator Sasaran 2 : Persentase penurunan PMKS		1,49	1,52	1,54	5,89
			Indikator Sasaran 3 : Persentase PPKS yang terpenuhi layanan dasar bidang sosial		91,19	92,64	94,11	94,11

7.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Untuk mengukur keberhasilan dan pencapaian tujuan Perangkat Daerah maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama yang spesifik, dapat diukur secara obyektif, realistis/dapat dicapai, bisa menggambarkan kinerja secara akurat dan relevan dengan kondisi riil serta menggambarkan perkembangan kinerja dalam kurun waktu tertentu. Pencapaian target IKU Dinas Sosial Kota Blitar diwujudkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan dengan masing-masing indikatornya yang terukur sebagai pedoman pelaksanaan, pengendalian serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan sosial. Pada perubahan Renstra ini disajikan IKU tahun 2022-2023 dan tahun 2024-2026 sebagai tindak lanjut evaluasi SAKIP 2023 oleh APIP sebagaimana tabel berikut :

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2022-2023

No	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Capaian Kinerja	
					2022	2023
1	Persentase fakir miskin yang berdaya	Fakir miskin yang berdaya adalah fakir miskin alumni pelatihan keterampilan yang telah bekerja/ mulai merintis usaha mandiri	$\frac{\text{Jumlah fakir miskin peserta pelatihan thn n-1 yang bekerja/mulai merintis usaha}}{\text{Jumlah fakir miskin peserta Pelatihan thn n-1}} \times 100\%$	%	10	10
2	Persentase Penurunan PMKS	PMKS adalah PMKS dengan 26 kategori sesuai Permensos RI no 8 th 2012	$\frac{(\text{Jumlah PMKS thn n-1}) - (\text{Jumlah PMKS thn n})}{\text{Jumlah PMKS thn n-1}} \times 100\%$	%	1,45	1,47

Tabel 7.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja			
					2024	2025	2026	Kondisi Akhir Renstra
1	Persentase fakir miskin yang berdaya	Fakir miskin yang berdaya adalah fakir miskin yang telah menerima pelatihan keterampilan dan mulai merintis usaha/bekerja dan/atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos yang graduasi mandiri (kondisi sosial ekonominya sudah meningkat dan dikategorikan mampu sehingga sudah tidak layak lagi mendapatkan bantuan sosial)	(Akumulasi jumlah fakir miskin eks peserta pelatihan keterampilan sampai dengan thn n yang mulai merintis usaha/ bekerja + akumulasi KPM Bansos yang graduasi mandiri) _____ x 100% Jumlah fakir miskin thn n	%	2,32	2,77	3,24	3,24
2	Persentase Penurunan PMKS	PMKS adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan 26 kategori sesuai Permensos RI no 8 th 2012	(Jumlah PMKS thn n-1) – (Jumlah PMKS thn n) _____ x 100% Jumlah PMKS thn n-1	%	1,49	1,52	1,54	5,89

7.3. Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dinas Sosial merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang sosial dengan Indikator Kinerja Kunci yang ditetapkan sebagai berikut :

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2021-2026 disusun guna menyesuaikan nomenklatur, indikator kinerja, target kegiatan dan sub kegiatan dengan ketentuan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Disamping itu perubahan Renstra ini merupakan tindak lanjut evaluasi SAKIP tahun 2023 oleh APIP maupun Kementerian PAN dan RB. Tidak ada perubahan yang mendasar dalam Perubahan Renstra ini. Tujuan, sasaran dan substansi program serta kegiatan tetap bermuara dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kota Blitar 2021-2026 yang disusun melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan.

Perubahan Renstra ini merupakan pedoman untuk penyusunan dokumen perencanaan tahunan/Rencana Kerja Dinas Sosial, guna memberikan arah, acuan kinerja, pedoman operasional, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan periode 2024-2026.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Blitar ini diharapkan tujuan, arah dan cita-cita pembangunan di bidang kesejahteraan sosial dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, tentunya tidak terlepas dari koordinasi, kerja sama yang baik dan peran serta aktif seluruh stake holder terkait.